



TIPS

Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial
Vol. 1 – No. 1 Juni 2023

<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips>

RUANG LINGKUP DAN KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Alya Sabrina Ramdhani Hasibuan¹, Nurhayati², Salsabila Humaira³, Eka
Damayanti Hasibuan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: alyasabrinaramdhanahasibuan@gmail.com¹,
nurhayatinurbkj@gmail.com², salsabilahumaira87@gmail.com³,
ekadamayanti@gmail.com⁴

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan di era globalisasi sangat diperlukan mengingat posisinya yang sangat strategis, terutama untuk pembentukan bangsa dan pembangunan karakter. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membuktikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Metode literatur digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dalam membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan ciri khas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Hasilnya membuktikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek pembelajaran kewarganegaraan. Oleh karena itu Pancasila merupakan ciri khas Negara Indonesia sebagai sistem filosofis yang menjiwai seluruh konsep ajaran Kewarganegaraan dan harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Ruang Lingkup dan Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan.

Abstract

Citizenship Education in the era of globalization is very necessary given its very strategic position, especially for nation building and character building. The purpose of this article is to prove that Citizenship Education in Indonesia is inseparable from the values of Pancasila. The literature method is used to draw conclusions in proving that Pancasila is an ideology and a hallmark of citizenship education in Indonesia. The results prove that Citizenship Education must be in accordance with Pancasila values in all aspects of civics learning. Therefore Pancasila is a characteristic of the Indonesian State as a philosophical system that animates all the concepts of Citizenship and must be applied in the life of the nation and state.

Keywords: Scope, and Basic Concepts of Citizenship Education

PENDAHULUAN

Konsep Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bertujuan mempancasilakan warga negara Indonesia atau menciptakan manusia Indonesia yang pancasialis. Artinya menciptakan manusia Indonesia yang yang

berwatak, bersikap, dan bermoral Pancasila. Seperti pendidikan agama yang dapat menunjang pendidikan karakter yang diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan (Juliati,2015). Pendidikan agama juga penting sebagai penguatan pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang pertama (Dewantara,2015).

Tujuan penyajian konsep kewarganegaraan berkenaan dengan peningkatan kesadaran dan kemampuan diri pribadi seseorang, seperti : a.) memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengertian yang benar, b.) meletakkan dan menanamkan pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, c.) menanamkan nilai moral Pancasila ke dalam diri seseorang , d.) mengugah kesadaran seseorang , e.) memberikan dorongan agar dalam kehidupan sehari- harinya bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber referensi. Studi literatur ini akan berfungsi dalam mengidentifikasi perbandingan dan referensi tentang pendidikan kewarganegaraan di setiap negara khususnya di Indonesia (Muslim et al, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.

Kewarganegaraan berarti keanggotaan masyarakat dalam satu negara sehingga menjadi jelas hak dan kewajibannya terhadap negara. Sementara pendidikan kewarganegaraan adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan keanggotaan masyarakat di dalam sebuah negara. Dengan memperoleh pendidikan kewarganegaraan diharapkan setiap masyarakat dapat memahami dengan mudah perannya sebagai individu, anggota masyarakat dan warga negara dalam interaksi atau hubungannya dengan sesama warga negara di dalam negara.

Ada 8 aspek ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yang didalamnya berisi tata kehidupan, nilai-nilai serta peraturan yang mengatur kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat di suatu negara. Yaitu sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa

Aspek pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta lingkungan, partisipasi dalam bela negara, sumpah pemuda, keutuhan NKRI, sikap positif terhadap NKRI.

2. Norma, hukum, dan peraturan

Aspek yang kedua adalah macam-macam norma, hukum, dan peraturan. Aspek ini meliputi: tata tertib di sekolah, peraturan dalam kehidupan keluarga, peraturan-peraturan daerah, norma di masyarakat, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum dan peradilan internasional sistem hukum dan peradilan nasional.

3. Hak asasi manusia

Aspek ketiga ialah Hak asasi Manusia. Aspek ini meliputi: hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, hak dan kewajiban anak, penghormatan dan perlindungan HAM. Semuanya manusia mempunyai hak dan kewajiban warganegara maka dari itu HAM di Indonesia sangat dijunjung tinggi.

4. Kebutuhan warga negara

Aspek yang berikutnya adalah kebutuhan warga negara yang meliputi: harga diri sebagai masyarakat, gotong royong, kebebasan untuk berorganisasi, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, menghormati keputusan bersama, prestasi diri, kesamaan kedudukan warga negara.

5. Konstitusi Negara

Aspek yang selanjutnya yaitu konstitusi negara. Aspek ini meliputi: konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, hubungan antara dasar negara erat kaitannya dengan konstitusi.

6. Kekuasaan dan Politik

Aspek yang keenam adalah kekuasaan dan politik yang meliputi: sistem pemerintahan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan desa dan

kecamatan, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, budaya politik, pers dalam masyarakat demokrasi.

7. Ideologi Pancasila

Aspek yang berikutnya adalah Pancasila yang merupakan dasar negara. Aspek ini meliputi: proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi

Aspek yang terakhir adalah globalisasi. Aspek globalisasi meliputi: politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, globalisasi yang terjadi di lingkungannya, dampak yang ditimbulkan globalisasi, hubungan internasional dan pengertian organisasi internasional, dan evaluasi globalisasi. (Abdul Rozak S, Pd. 2022)

9. Konsep dasar Pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berawal dari pengajaran Pendidikan moral Pancasila (PMP). PMP berawal dari *civic*. *Civic* diambil dari mata pelajaran di amerika serikat yang berasal dari Bahasa latin *civis* yang berarti : a.) warga negara, b.) sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, c.) bawahan dan kawula.

Setelah Indonesia merdeka pelajaran *civic* mulai diberlakukan dengan berbagai alasan kebangsaan. Secara formal *civic* diajarkan dalam kurikulum 1948. Dan tahun 1972 *civic* diganti menjadi pendidikan kewarga negaraan (PKN). Tahun 1984 PKN diganti nama menjadi PMP. Dan pada tahun 1994 PMP diganti nama menjadi PPKn. Perubahan *civic* menjadi PKN, PMP, PPKn tersebut pada dasarnya ingin memerankan fungsi guru sebagai pendidik, pengajar dan pelatih secara optimal.

Munculnya ide mengenai pentingnya pelajaran Pendidikan kewarganegaraan oleh beberapa pertimbangan ketatanegaraan, ialah:

- a. perlunya landasan filsafat sebagai dasar tata hidup kenegaraan.
- b. ketidakstabilan politik sejak proklamasi kemerdekaan RI.
- c. perlu adanya penghayatan dan pengamalan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan oleh seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Pada hakekatnya pendidikan yang mampu membentuk karakter bangsa (berkeadaban) adalah:

1. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan bagi pembentukan manusia seutuhnya.
2. Merupakan proses interaksi manusiawi yang di tandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik.
3. Pendidikan pada prinsipnya berlangsung seumur hidup.
4. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan semakin besar.
5. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan, kionstitusi, lembaga demokratis, HAM, dan masih banyak lagi. Yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menjadi rakyat yang dapat bersikap demokratis (dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad maskur (2003) *Pendidikan kewarganegaraan dalam metode praktis*. Palembang.
- Asep sahid gatara FH dkk (2012). *Pendidikan kewarganegaraan : Pendidikan politik, nasionalisme dan demokrasi*. Jakarta : penerbit focus media.
- Bambang dkk (1993) *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*, Lembaga Pendidikan primagama, yogyakarta.
- Daryono M.dkk (2011). *Pengantar Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, Jakarta : penerbit rineka cipta.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan (1992), *Pendidikan Pancasila*. Dirjen Pendidikan tinggi, proyek pembinaan tenaga Pendidikan, Jakarta
- Hamid darmadi (2008), *dimensi Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Bandung : alfabeta
- Kymlicka,will (1995) *kewarganegaraan pelbagai budaya*. Oxford
- Rohmanurmeta, Fauzatul Ma'rufah. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. CV. AE MEDIA GRAFIKA, 2022

Sumarsono S,dkk (2002), *Pendidikan kewarganegaraan* , Jakarta: PT,Gramedia
Pustaka utama.